

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Krisis ekonomi yang terjadi di Asia pada periode 1990-an, berdampak luas terhadap negara-negara di sekitarnya termasuk Indonesia. Menurut Daniri (2005:3) hal ini terjadi karena adanya sistem hukum yang buruk, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan Dewan Direksi (*Board of Direction*) yang kurang peduli terhadap hak pemegang saham minoritas. Pada tahun 1997-an, di Indonesia mulai terkena dampak dari krisis besar-besaran tersebut. Krisis yang terjadi di Indonesia diawali dengan terjadinya krisis politik yang kemudian berakibat pada system perekonomian yang mengalami keterpurukan dan ketidakpastian yang luar biasa.

Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu: (1) perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi), (2) konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga secara praktis perusahaan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara manajemen dan pemegang saham dan (3) perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan perlu memiliki suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak

kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan memperoleh keuntungan investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi, selain itu juga harus dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan perlu memiliki suatu system pengelolaan perusahaan yang baik, yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan memperoleh keuntungan investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi, selain itu juga harus dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri.

*Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan guna peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *Corporate Governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi para *stakeholders*. Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi *stockholder* dan *stakeholder* sehingga mereka akan yakin memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar. *Corporate Governance* juga membantu menciptakan iklim kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan berkesinambungan di sektor korporasi (Tjondro & Wilopo, 2011).

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Isu mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *Good Corporate Governance* (GCG) yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka para pelaku bisnis di Indonesia menyepakati penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian *Letter of Intent* (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya yang

cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu factor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu struktur yang diterapkan agar perusahaan dapat semakin berkembang dan terus meningkatkan kinerja dengan didasari oleh perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Berkaitan dengan nilai-nilai etika yang mendasari kegiatan bisnis sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG). Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*.

Pada Negara maju, *Corporate Governance* sudah lama menjadi suatu masalah yang populer dibicarakan orang karena dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, perusahaan dapat meningkatkan standar kehidupan secara material dan meningkatkan kohesi sosial masyarakat. Pemahaman atas *Corporate Governance* di Indonesia masih banyak yang keliru, hal ini dikarenakan mereka menafsirkan sesuai kepentingannya. Kalangan bisnis umumnya menafsirkan *Good Corporate Governance* sebatas bagaimana perusahaan meningkatkan laba menempatkan manajer dan karyawan serta mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara para pejabat dan wakil rakyat, umumnya menafsirkan *Corporate*

*Governance* sebagai keharusan perusahaan agar bermanfaat bagi pemerintah dan lingkungan sosialnya.

Indonesia telah membentuk suatu komite pada tahun 1999 yang bertugas untuk merekomendasikan pedoman umum *Good Corporate Governance* (GCG) yang pertama yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG). Berdasarkan KEP/49/M.EKON/11/2004 kemudian KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan menghasilkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2006 yang menjadi dasar bagi perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang diubah menjadi PER-01/MBU/2011 dan kemudian disempurnakan lewat PER-09/MBU/2012.

Adanya hal-hal terkait kebijakan pemerintah memberikan gambaran mengenai kebutuhan akan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia yang semakin menjadi topic menarik untuk dibahas. Pemerintah menginginkan keseragaman pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) namun dalam praktik nyata masih terdapat tingkatan atau perbedaan kepatuhan perusahaan-perusahaan terhadap peraturan yang ada.

*Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan merupakan sistem dan struktur yang mengarah dan mendukung terciptanya perusahaan berkelas dunia yang berdaya saing tinggi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dengan komunikasi yang efektif antar manajemen dan pemegang saham, terciptanya pengambilan keputusan yang baik, serta meningkatkan pelayanan kepada publik maupun pemegang saham dan akan membawa pengaruh terhadap kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang lebih efektif dan efisien.

Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, salah satu tujuan penting didirikannya perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan indikator

baik buruknya keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan. Hasil dari kegiatan perusahaan diukur dengan alat ukur kinerja yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan.

Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan yang dibuat dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektifitas terjadi apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal (Purwani, 2010).

Perusahaan dengan kinerja yang baik akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan tersebut, sehingga mendapat kepercayaan dari publik dan investor pun nyaman menginvestasikan modalnya pada perusahaan. Masyarakat sebagai konsumen pun juga akan merasa nyaman menggunakan jasa atau barang dan dihasilkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan juga dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi untuk perbaikan. Penilaian kinerja perusahaan dapat diukur dengan analisis dan evaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan.

PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk merupakan Industri kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) berpotensi menghasilkan perkembangan ekonomi dan sosial yang signifikan di Indonesia. Sejarah potensi dan peluang pembangunan kelapa sawit mengindikasikan bahwa kelapa sawit masih mempunyai nilai positif kedepan, khususnya terkait dengan nilai tambah dan daya saing. Namun kelapa sawit juga menghadapi masalah atau kendala terkait dengan teknologi, ekonomi, sosial dan tata kelola. World Growth (2011) melaporkan bahwa industri kelapa

sawit Indonesia mendapatkan kecaman dari sejumlah LSM yang menentang industri ini karena bertanggungjawab atas penggundulan hutan, emisi karbon dan hilangnya keragaman hayati.

Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya melainkan perusahaan harus mempunyai rasa tanggung jawab social dunia bisnis juga menuntut bagaimana cara perusahaan mengelola perusahaannya dengan baik sebagaimana tuntutan global. Tata kelola (*corporate governance*) yang dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta manajemen perusahaan yang mampu menunjukkan kinerja yang baik.

Dari uraian singkat diatas mengenai praktek penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penerapan *Corporate Governance* untuk peningkatan kinerja perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengambil judul untuk penulisan skripsi yaitu “Analisis Penerapan *Corporate Governance* Untuk Peningkatan Kinerja Pada Perusahaan (Studi pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk).

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah prinsip *Corporate Governance* telah diterapkan pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk?
2. Apakah *Corporate Governance* berperan untuk peningkatan kinerja pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk sudah berjalan dengan baik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip *Corporate Governance* pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk telah diterapkan.
2. Untuk menganalisis apakah peran *Corporate Governance* akan meningkatkan kinerja PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang didapat penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sesuai dengan tujuan diatas sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu *Corporate Governance*

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan berfikir tentang *Corporate Governance* di perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan bahan pertimbangan untuk melaksanakan *Corporate Governance* dengan lebih baik lagi oleh perusahaan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan refeensi bagi penelitian berikutnya yang akan mengambil masalah yang sama dan dijadikan sebagai informasi tambahan dalam penelitiannya.